

PERAN SDM: KEBERLANGSUNGAN TATA KELOLA KINERJA KEUANGAN BUMDES DI DESA SUNGAI DUSUN, KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Agus Maulana¹, Muhammad Fauzan², Ramli Walid³, Helly Khairuddin⁴, Edi Susanto⁵

^{1,2,3,4}Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi & Bisnis, Universitas Islam Indragiri, Indonesia

Email : agusmaulanaunisi@gmail.com

Abstract

BUMDes is an embodiment of Law No. 6 of 2014, which requires full attention in its management. Budget planning and sources of revenue are crucial for the allocation of expenditures carried out by the management together with the director, aimed at maximizing the achievement of the welfare of the members of the business unit in order to generate profit. It is hoped that this community service activity will make BUMDes in Sungai Dusun Village a benchmark for the financial governance of this village institution. This literature study aims to provide insights into the role of management in overseeing the finances of BUMDes, which can implement an Auto-evaluation Model of Village-Owned Enterprises using financial performance analysis tools. This will allow for self-reflection on future business strategies and what should be done. The research results indicate that important indicators and the form of the balance sheet differ slightly from the generally accepted accounting principles.

Abstrak

BUMDes merupakan sebuah Amanah Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, yang harus mendapat perhatian penuh dalam Tata Kelolanya. Perencanaan Anggaran dan Sumber-sumber Pendapatan menjadi penting dalam penyaluran Pembelanjaan yang dilakukan pengurus bersama direktur yang dimanfaatkan sebesar-berasnya untuk mencapai tujuan kesejahteraan anggota unit usaha dalam mencapai laba. Diharapkan dengan adanya kegiatan pengabdian ini BUMDes Desa Sungai Dusun akan menjadi tolak ukur dalam tata kelola keuangan Lembaga Desa ini. Study Literatur ini bertujuan untuk membuka sedikit keilmuan tentang bagaimana peran pengurus dalam mengelola Keuangan BUMDes yang dapat melakukan Model Auto-evaluation of Village's Owned Enterprise dengan alat Analisa Kinerja Keuangan BUMDes sehingga dapat introspeksi diri terhadap usaha kedepannya, apa yang seharusnya dilakukan. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa indikator penting dan bentuk neraca yang sedikit agak berbeda dengan SAK pada umumnya.

Article history:

Received 06 05, 2025

Revised 06 23, 2025

Accepted 06 30, 2025

Keywords:

Governance, Budget, Revenue, Expenditure, Financial Performance

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Zulkarnain et.al (2025) Kontribusi BUMDes dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa sangat signifikan, karena BUMDes berperan sebagai salah satu pilar penting dalam ekonomi desa. Sebagai badan usaha yang dikelola oleh pemerintah desa, BUMDes tidak hanya bertujuan untuk memperoleh keuntungan finansial, tetapi juga memiliki misi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa secara keseluruhan. Peran SDM BUMDes pada pengelolaan anggaran, pendapatan, dan pembelanjaan BUMDes menjadi elemen utama dalam memastikan keberlanjutan dan kesuksesan operasional BUMDes.

Afifah, A & Supriyanto, H. (2022) Anggaran merupakan dokumen yang menggambarkan perencanaan keuangan BUMDes untuk suatu periode tertentu. Anggaran ini disusun berdasarkan analisis kebutuhan, potensi sumber daya desa, dan peluang pengembangan usaha. Proses penyusunan anggaran di BUMDes diawali dengan identifikasi kebutuhan operasional dan investasi. Kebutuhan

tersebut meliputi pengeluaran untuk aktivitas bisnis, gaji karyawan, biaya perawatan, hingga pengembangan usaha baru. Penyusunan anggaran harus dilakukan dengan melibatkan pengelola BUMDes, pemerintah desa, dan tokoh masyarakat agar kebutuhan desa terakomodasi secara menyeluruh.

Bastian, N. (2021). Pendapatan BUMDes ditentukan oleh tujuan strategi yang baik dan memiliki karakteristik SMART: Specific (spesifik), Measurable (dapat diukur), Achievable (dapat dicapai), Relevant (relevan), dan Time-bound (terikat waktu). Misalnya, jika tujuan BUMDes adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka sasaran strategisnya dapat mencakup peningkatan jumlah produk lokal yang dipasarkan, peningkatan pendapatan dari kegiatan usaha, atau peningkatan jumlah masyarakat yang dilibatkan dalam program pemberdayaan. Penentuan tujuan dan sasaran strategis juga memerlukan partisipasi aktif dari berbagai pihak yang terlibat, termasuk pemerintah desa, pengelola BUMDes, dan masyarakat. Melibatkan semua pihak dalam proses ini memastikan bahwa tujuan dan sasaran yang ditetapkan mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Selain itu, partisipasi ini mendorong rasa memiliki dan tanggung jawab bersama terhadap keberhasilan BUMDes.

Rumusan Masalah

1. Apa dampak dari pengelolaan SDM terhadap kinerja keuangan BUMDes di Desa Sungai Dusun?
2. Bagaimana efektivitas perencanaan anggaran dalam meningkatkan pendapatan BUMDes?
3. Apa saja tantangan yang dihadapi BUMDes dalam implementasi kebijakan pemerintah terkait pengembangan desa?
4. Bagaimana keberlangsungan tata kelola BUMDes mempengaruhi kesejahteraan masyarakat desa?

Tujuan Penelitian

1. Menganalisis pengaruh pengelolaan SDM terhadap kinerja keuangan BUMDes di Desa Sungai Dusun.
2. Mengukur efektivitas perencanaan anggaran dalam meningkatkan pendapatan BUMDes.
3. Mengidentifikasi tantangan yang dihadapi BUMDes dalam melaksanakan kebijakan pemerintah untuk pengembangan desa.
4. Menilai dampak keberlangsungan tata kelola BUMDes terhadap kesejahteraan masyarakat desa.

2. TELAAH PUSTAKA

Dasar Penetapan BUMDes

UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 213 ayat (1) disebutkan bahwa “Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa”, yang sebelumnya telah diterbitkan UU No.22 tahun 1999. Disebutkan pula bahwa tujuan pendirian BUMDes antara lain dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADesa). Saragi, Muluk et. al (2021) dalam bukunya menyebutkan ada 5 tujuan pembentukan BUMDes yaitu, (a) peningkatan kemampuan keuangan desa,

(b) pengembangan usaha masyarakat dalam rangka pengentasan kemiskinan, (c) mendorong tumbuhnya usaha masyarakat, (d) penyedia jaminan sosial, (e) penyedia pelayanan bagi masyarakat desa.

UU No. 6 Tahun 2014 diperkuat dengan PP No. 43 Tahun 2015 dan PP No. 11 tahun 2021 tentang Perkuatan Pendirian BUMDes sebagai Lembaga Ekonomi Desa yang mandiri, masih saja belum dapat diandalkan. Menurut Aidi, Syahrul (2020) Kinerja Direktur BUMDes belum menunjukkan dampak yang signifikan terhadap pengentasan kemiskinan terbukti pada pengucuran dana anggaran tahun 2020 sebesar Rp. 1.452,58 (dalam milyar) naik dibandingkan dana anggaran tahun 2019 sebesar Rp 1.434,58 (dalam milyar) dan tahun 2018 sebesar Rp 1.260,54 (dalam milyar) yang tersebar 1.591 Desa di Provinsi Riau hanya mampu meningkatkan 4,31 persen Product Domestic Regional Bruto (PDRB) per kapita.

Perencanaan Anggaran

Huda, F., & Wijaya, B. (2021), Perencanaan Anggaran berdasarkan Manajemen Risiko yang efektif. Setiap usaha, termasuk BUMDes, pasti menghadapi risiko yang dapat mempengaruhi keberlanjutan usahanya. Oleh karena itu, penting bagi BUMDes untuk memiliki sistem manajemen risiko yang baik agar dapat memitigasi potensi kerugian atau gangguan yang mungkin terjadi. Ada dua faktor dalam dimensi Risiko:

- a. Identifikasi Risiko secara berkala: BUMDes harus secara berkala melakukan identifikasi risiko, baik yang bersifat internal (misalnya, kesalahan manajerial atau keuangan) maupun eksternal (misalnya, bencana alam atau perubahan pasar). Dengan mengetahui risiko yang mungkin terjadi, BUMDes dapat merencanakan langkah-langkah mitigasi yang tepat.
- b. Penyusunan Rencana Kontinjensi: BUMDes perlu memiliki rencana kontinjensi yang jelas untuk menghadapi situasi darurat. Rencana ini harus mencakup langkah- langkah yang perlu diambil jika terjadi masalah besar, seperti kerusakan fasilitas, kekurangan dana, atau bencana alam.

Pendapatan BUMDes

Harsojo, B. (2021), Pendapatan BUMDes diperoleh dari berbagai sumber, termasuk hasil usaha yang dijalankan, dividen dari kerja sama dengan pihak lain, serta bantuan atau hibah dari pemerintah atau pihak swasta. Untuk meningkatkan pendapatan, BUMDes harus mampu mengelola usaha secara profesional dan inovatif. Diversifikasi usaha menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan pendapatan secara berkelanjutan. BUMDes juga perlu memastikan bahwa pendapatan yang diperoleh dikelola secara efisien dan efektif. Hal ini mencakup pengalokasian pendapatan untuk berbagai pos, seperti operasional, investasi, pengembangan kapasitas, dan kontribusi bagi pembangunan desa. Pengelolaan pendapatan yang baik menciptakan siklus keuangan yang sehat bagi BUMDes.

Pembelanjaan Usaha

Iwan, D., & Yulia, S. (2023). Pembelanjaan merupakan salah satu aspek penting dalam pengelolaan keuangan BUMDes. Semua bentuk pengeluaran harus direncanakan dengan cermat untuk menghindari pemborosan dan memastikan setiap dana yang dikeluarkan memberikan manfaat maksimal. Pembelanjaan ini mencakup biaya produksi, pemasaran, operasional, dan kegiatan lainnya yang mendukung kelangsungan usaha BUMDes. Dalam pengelolaan anggaran, pendapatan, dan pembelanjaan, penting bagi BUMDes untuk mengikuti prinsip- prinsip dasar keuangan, seperti transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keberlanjutan. Transparansi memastikan bahwa masyarakat desa dan pihak-pihak terkait dapat mengawasi penggunaan anggaran dan pembelanjaan dengan jelas. Akuntabilitas memberikan kepercayaan bahwa pengelolaan dana dilakukan secara bertanggung jawab.

Evaluasi Kinerja Keuangan

Fira, P. (2020), BUMDes juga harus melakukan evaluasi rutin terhadap pelaksanaan anggaran, pendapatan, dan pembelanjaan. Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua target yang telah direncanakan dapat tercapai sesuai dengan waktu dan anggaran yang tersedia. Hasil evaluasi juga menjadi

dasar untuk perbaikan dan penyusunan anggaran di periode berikutnya. Selain itu, pengelolaan keuangan BUMDes harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini mencakup pelaporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi dan audit yang transparan. Kepatuhan ini tidak hanya menjaga legalitas operasional BUMDes tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaannya.

Keberlangsungan Tata Kelola

Abadi, R. (2021) Tren masa depan yang mempengaruhi bisnis BUMDes sangat penting untuk dipahami dalam rangka mengantisipasi perubahan dan memastikan keberlanjutan usaha di masa depan. Perubahan ini bisa terjadi dalam berbagai aspek, mulai dari teknologi, sosial, ekonomi, hingga regulasi pemerintah. Oleh karena itu, BUMDes perlu memahami tren-tren ini agar dapat menyesuaikan diri dan meraih peluang baru yang ada. Penggunaan perangkat lunak dan aplikasi berbasis cloud untuk manajemen keuangan, pemasaran, hingga pengelolaan sumber daya manusia memungkinkan BUMDes untuk lebih efisien dan efektif dalam operasionalnya.

Di sisi lain, revolusi industri 4.0 dan Internet of Things (IoT) menjadi tren yang perlu diwaspadai. Meskipun saat ini masih banyak desa yang belum sepenuhnya mengadopsi teknologi canggih, semakin banyak usaha yang mengandalkan data real-time dan perangkat pintar untuk memantau kondisi operasional mereka. BUMDes yang mengadopsi teknologi IoT, misalnya, bisa memanfaatkan sensor untuk memonitor kondisi pertanian atau produk-produk yang dihasilkan. Teknologi ini dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas secara signifikan.

3. METODE PENELITIAN

Studi Literatur Riset yang pernah dilakukan terdahulu menginspirasi Tata Kelola Kinerja Keuangan menurut Kerangka Pikir penelitian Ramayani, FR & Fitri, YE, (2023), sehingga pada penelitian ini membentuk Kebijakan Pemerintah pada BUMDes mendorong Perencanaan Anggaran, Pendapatan Usaha, Pembelanjaan Usaha, kemudian ketiganya cenderung mempengaruhi Evaluasi Kinerja Keuangan yang akan menentukan Keberlangsungan Tata Kelola BUMDes.

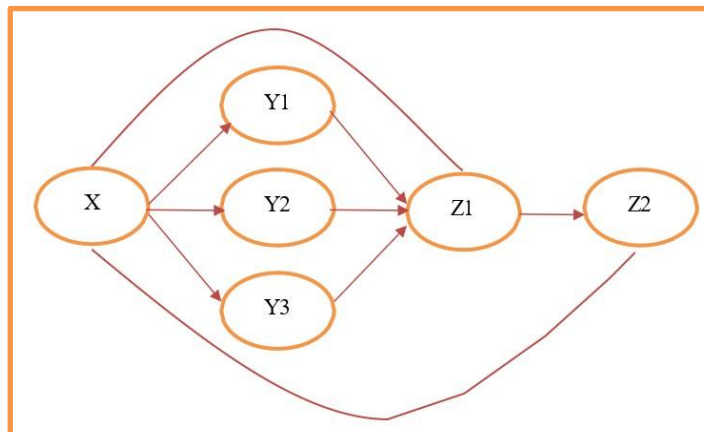


Diagram: Model Auto-evaluation of Village's Owned Enterprise

Adapun dalam pembahasan pada penelitian pengabdian Masyarakat ini mengaitkan 8 (delapan) tahapan penyusunan bagaimana cara merencanakan dan mengelola keuangan BUMDes bagi potensi SDM dan potensi SDA untuk mencegah terjadinya resiko kerugian. Menurut Dany (2023) diantaranya (1) Perhitungan Aset Awal, (2) Penentuan Kegiatan Usaha (3) Memproyeksikan Biaya (4) Memproyeksikan Target Pendapatan (5) Memproyeksikan Biaya Investasi (6) Memproyeksikan Perubahan Aset (7) Memperhitungkan Kebutuhan Permodalan (8) Menentukan Sumber Permodalan.

Hipotesis: Diduga bahwa Kebijakan Pemerintah pada BUMDes mendorong Perencanaan Anggaran, Pendapatan BUMDes, Pembelanjaan Usaha, cenderung mempengaruhi Evaluasi Kinerja Keuangan yang akan menentukan Keberlangsungan Tata Kelola BUMDes yang kemudian kembali berpengaruh pada Kebijakan Pemerintah yang baru.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Berdasarkan diagram Model Auto-evaluation of Village's Owned Enterprise model yang disebut dalam penelitian ini adalah alat analisis kinerja keuangan BUMDes yang sebelumnya belum pernah ditulis.

Tabel 4.1. Operasional Variabel

Variabel	Indikator
X= Kebijakan Pemerintah	1. Menumbuhkan Perekonomian Desa 2. Mensejahterakan Masyarakat Desa
Y1= Perencanaan Anggaran	1. Resiko Berkala 2. Rencana Kontinjensi
Y2= Pendapatan BUMDes	1. Hasil Usaha 2. Deviden 3. Hibah
Y3= Pembelanjaan Usaha	1. Fix Cost 2. Variabel Cost
Z1= Evaluasi Kinerja Keuangan	1. Financial 2. Non Finansial
Z2=Keberlangsungan Tata Kelola	1. IoT 2. Ekonomi

Sumber: Literatur, 2025

Tabel Operasional tersebut merupakan variabel-variabel dan indikatornya yang terbentuk dari kerangka pikir berupa model reflektif dan formatif yang diinginkan, dimana indikator yang terdapat didalamnya erat kaitannya dengan bagian-bagian dari Laporan Keuangan pada Neraca khususnya pada Kekayaan dan Kewajiban.

Laporan Keuangan Neraca BUMDes

Debet / Asset / Kekayaan	Kredit / Kewajiban / Hutang
Pendapatan / Aktiva Lancar	Hutang
- Kas	- Pinjaman Jangka Pendek
- Piutang	- Pinjaman Jangka Panjang
- Setara Kas / Cek / Giro	- Kerjasama Modal
- Hibah	- Tabungan Mitra Usaha
- Persediaan/Stok	

Kekayaan / Harta Tidak Bergerak - Tanah / Gedung - Inventaris	Laba - Deviden - Bagi Hasil - Benefit - Sisa Hasil Usaha
Kekayaan / Harta Bergerak - Angkutan Darat/Laut/Udara - Transportasi	Keuntungan - THR - Tunjangan Kinerja

Sumber: Literatur, 2025

Adapun susunan Laporan Keuangan Neraca BUMDes tersebut diatas merupakan temuan baru dari rekayasa pengetahuan yang diperoleh berdasarkan Literatur yang ada sehingga bentuknya sedikit berbeda dari bentuk Standar Akuntansi Keuangan yang ada.

Sebagai bagian dari kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM), kami melaksanakan berbagai aktivitas yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Foto di bawah ini menunjukkan salah satu momen penting selama pelaksanaan kegiatan, di mana anggota tim kami bersama masyarakat desa terlibat langsung dalam diskusi mengenai perencanaan anggaran BUMDes.



Gambar 1: Diskusi perencanaan anggaran BUMDes bersama perangkat desa, yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan.



Gambar 2: Foto bersama dengan perangkat desa Sungai Dusun

Dengan melibatkan masyarakat dalam setiap tahap perencanaan, kami berharap dapat menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab bersama terhadap keberhasilan BUMDes. Kegiatan ini tidak hanya memberikan wawasan kepada masyarakat tentang pengelolaan keuangan, tetapi juga meningkatkan partisipasi mereka dalam pembangunan desa.

Pembahasan

Perencanaan Anggaran, bermula dari dasar penetapan dan pendirian Lembaga Usaha Desa dengan adanya modal dasar berupa perhitungan asset awal, penentuan kegiatan usaha dan memproyeksikan biaya. Perhitungan Aset Awal, berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 dinyatakan bahwa ketika pendirian Lembaga Usaha Desa ini, seluruh potensi sumberdaya alam dan potensi sumberdaya manusia yang ada pada suatu desa menjadi asset awal dalam pendirian BUMDes, sehingga tanggung jawab dalam pengelolaan kekayaan yang ada di desa adalah semata-mata untuk mensejahterakan Masyarakat desa. Hal ini sangat jelas bahwa setiap desa memiliki potensi yang berbeda-beda dari karakter dan geografis desa maupun masyarakatnya. Ditambah lagi dengan adanya bantuan hibah permodalan dari Pemerintah Pusat, tidak menutup kemungkinan dapat mempercepat kemajuan usaha dan kemajuan pertumbuhan ekonominya.

Penentuan Kegiatan Usaha, yang telah diamanahkan dan pengarahannya dari PP No.11 Tahun 2021 tentang memperkuat perekonomian desa melalui Lembaga Usaha Desa yang mandiri dan Sejahtera dikatakan bahwa beraneka ragamnya potensi desa menjadikan sebuah keunikan berbagai jenis usaha yang dapat ditimbulkan oleh BUMDes sehingga dapat menjadikan suatu kekuatan pertumbuhan Pembangunan Ekonomi Desa yang dapat menimbulkan usaha baru yang mendatangkan pendapatan bagi masyarakatnya. Usaha pemerintah dalam membangun desa mandiri yang dapat mensejahterakan masyarakatnya sudah berjalan 20 tahun yang lalu namun hingga saat ini masih saja belum mencapai pada titik derajat kemajuan yang ditargetkan, ditandai dengan masih banyaknya status BUMDes yang belum maju.

Memproyeksikan Biaya, merupakan hal penting memperkirakan seberapa besar biaya yang akan dikeluarkan untuk keberlangsungan operasional pada *fix cost* dan *variabel cost*. Biaya tetap yang rutin diantaranya gaji pengelola dan staf, biaya komunikasi dan alat tulis dan cetak laporan sedangkan biaya variabel timbul seiring dengan perkembangan usaha biasanya ada pada keuntungan yang diperoleh, diantaranya biaya laba bagi hasil, biaya pembagian benefit dan sisa hasil usaha.

Pendapatan BUMDes, diperoleh dari keuntungan dari unit-unit usaha yang dijalankan berupa diantaranya deviden dari pembagian keuntungan pada modal yang ditanamkan oleh pihak ketiga pada permodalan BUMDes, baik berupa aktiva lancar maupun berupa aktiva tetap; bagi hasil

Memproyeksikan Target Pendapatan, sebagai *forecasting* pada perencanaan menjadikan sebuah motivasi yang cukup kuat untuk mencapai tujuan Perusahaan. Tujuan *forecasting* (peramalan) adalah memprediksi kejadian atau kondisi di masa depan berdasarkan data historis dan analisis tren. Tujuan utama *forecasting* dalam bisnis adalah untuk membuat keputusan yang lebih baik dalam berbagai aspek, seperti produksi, kapasitas, pengadaan bahan baku, dan strategi pemasaran.

Pembelanaan Usaha yang terdiri dari memproyeksikan biaya investasi dan memproyeksikan perubahan asset menjadi dua hal yang saling terkait sebagaimana yang dimaksud dalam neraca atau laporan kinerja keuangan dan rugi laba.

Memproyeksikan Biaya Investasi, bertujuan adalah untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai total biaya yang dibutuhkan dan potensi keuntungan bersih dari investasi tersebut. Proyeksi ini membantu investor dalam mengambil keputusan yang lebih tepat dan menghindari kejutan tak terduga di masa depan.

Memproyeksikan Perubahan Aset memiliki beberapa tujuan utama, di antaranya adalah untuk memprediksi kondisi keuangan perusahaan di masa depan, mengelola aset secara efektif, dan membuat perencanaan keuangan yang lebih baik. Proyeksi ini juga membantu dalam mengidentifikasi risiko dan peluang terkait dengan aset.

Evaluasi Kinerja yang terkait dengan memperhitungkan kebutuhan permodalan menjadi salah satu tujuan. Namun tujuan utama evaluasi kinerja adalah untuk mengukur, menilai, dan meningkatkan kinerja

individu maupun tim dalam suatu organisasi. Evaluasi kinerja membantu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan karyawan, serta memberikan umpan balik konstruktif untuk pengembangan diri dan organisasi.

Memperhitungkan Kebutuhan Permodalan, bertujuan agar dapat mengelola keuangan perusahaan dengan baik, mencegah defisit modal, dan memastikan ketersediaan dana untuk menjalankan operasi bisnis secara efektif. Dengan mengetahui kebutuhan modal dengan tepat, perusahaan dapat mengoptimalkan penggunaan dana dan menghindari risiko yang mungkin timbul akibat kekurangan atau kelebihan modal kerja.

Keberlangsungan Tata Kelola bertujuan memastikan bahwa organisasi atau masyarakat dapat terus mencapai tujuan mereka secara berkelanjutan, dengan mempertimbangkan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi (ESG). Ini mencakup berbagai aspek, seperti efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan pengambilan keputusan yang bijak, serta pengelolaan risiko yang efektif. Namun tidak terlepas dari bagaimana menentukan sumber permodalan.

Menentukan Sumber Permodalan melibatkan perencanaan dan evaluasi yang cermat. Tujuan utama adalah memastikan bisnis memiliki dana yang cukup untuk beroperasi dan berkembang, serta memilih sumber dana yang paling sesuai dengan kebutuhan dan kondisi keuangan Perusahaan. Cara menentukan sumber permodalan dengan cara tentukan tujuan permodalan, evaluasi kondisi keuangan, jenis sumber modal, evaluasi risiko dan manfaat, ketahui syarat dan ketentuan, pilih sumber modal yang sesuai. Tujuan menentukan sumber permodalan diantaranya keberlangsungan bisnis, pertumbuhan bisnis, peningkatan kepercayaan, pengelolaan risiko, efisiensi penggunaan modal.

5. KESIMPULAN

Aspek Kekayaan pada Badan Usaha Milik Desa, memiliki beberapa karakteristik penting. Pertama, kekayaan BUMDes adalah kekayaan Desa yang dipisahkan, artinya tidak terbagi atas saham seperti pada perusahaan biasa. Kedua, modal awal BUMDes berasal dari APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa). Ketiga, sumber pendanaan BUMDes dapat berasal dari penyertaan modal masyarakat Desa, hibah, atau penerimaan dari kegiatan usaha. Pengaruhnya terhadap masing-masing indikator kinerja keuangan yaitu:

1. Aktiva Lancar Aktiva lancar pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah aset yang dapat diuangkan dalam waktu kurang dari satu tahun. Contohnya meliputi kas, bank, piutang, persediaan, dan biaya dibayar di muka.
2. Harta Tak Bergerak pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah aset permanen yang tidak dapat dipindah-pindah, seperti tanah, bangunan, dan infrastruktur lainnya yang digunakan untuk kegiatan usaha BUMDes. Aset-aset ini menjadi bagian dari kekayaan desa yang dikelola oleh BUMDes untuk mencapai tujuan usaha.
3. Harta Bergerak pada BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) adalah kekayaan desa yang dipisahkan yang dapat berpindah tempat dan dapat dikelola oleh BUMDes. Contohnya adalah peralatan kantor, kendaraan, peralatan pertanian, inventaris, atau barang-barang lainnya yang dapat dipindahkan.

Aspek Kewajiban pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) mencakup kewajiban perpajakan, administrasi, dan pertanggungjawaban pengelolaan usaha. BUMDes sebagai wajib pajak memiliki kewajiban seperti menyusun pembukuan, membayar pajak penghasilan (PPh), dan memungut PPN (Pajak Pertambahan Nilai) jika sudah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Selain itu, pengurus BUMDes bertanggung jawab mengelola usaha sesuai AD/ART, menyusun laporan keuangan, dan mempertanggungjawabkan kegiatan usaha kepada masyarakat desa. Pengaruhnya terhadap masing-masing indikator kinerja keuangan yaitu:

1. Hutang pada BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) bisa terjadi dalam berbagai bentuk, seperti pinjaman untuk modal usaha, atau pinjaman untuk kebutuhan lain yang disetujui oleh BUMDes. Penyelesaian hutang di BUMDes biasanya mengikuti mekanisme yang sudah ditetapkan, seperti pembayaran angsuran bulanan, dan sanksi akan dikenakan jika ada wanprestasi.
2. Laba pada BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) adalah keuntungan bersih yang diperoleh dari seluruh kegiatan usaha yang dijalankan oleh BUMDes. Laba ini dapat digunakan untuk berbagai hal, seperti pemupukan modal usaha, pembangunan desa, atau bagi hasil kepada Masyarakat.

3. Keuntungan utama Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, mengembangkan potensi ekonomi desa, dan menciptakan lapangan kerja. Selain itu, BUMDes juga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD).

Saran

1. Dampak terhadap Kebijakan Pemerintah

UU No. 6 tahun 2014 bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan secara bertahap mensejahterakan desa. Harapannya, desa akan menjadi mandiri dalam pembangunan sumber daya manusia dan infrastruktur fisik. Pemerintah pusat ingin desa tidak lagi bergantung pada anggaran pusat, sehingga desa dapat menentukan kebijakan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan mereka sendiri.

2. Dampak terhadap Perencanaan Anggaran

Selama 20 tahun, cita-cita desa mandiri dan sejahtera belum tercapai sesuai harapan pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah sering melakukan evaluasi efisiensi anggaran dan mencari pola yang tepat untuk program pembangunan ekonomi dan kesejahteraan desa, mempertimbangkan keberagaman yang ada di Indonesia.

3. Dampak terhadap Pendapatan BUMDes

BUMDes yang dikelola dengan baik dapat memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian masyarakat desa. Peningkatan pendapatan asli desa (PADes) dari BUMDes akan digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti pembangunan fasilitas umum dan program-program yang meningkatkan kualitas hidup.

4. Dampak terhadap Pembelanjaan Usaha

Pembelanjaan oleh BUMDes pada barang dan jasa memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positifnya termasuk peningkatan pendapatan desa, kesejahteraan masyarakat, dan pengembangan ekonomi lokal. Namun, ada juga dampak negatif, seperti potensi korupsi, penyalahgunaan anggaran, dan kurangnya transparansi.

5. Dampak terhadap Kinerja Keuangan BUMDes

Kinerja keuangan BUMDes dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk modal, akuntabilitas, dan turbulensi. Modal memiliki pengaruh positif yang signifikan, sementara akuntabilitas dan turbulensi juga berpengaruh. Oleh karena itu, pengelolaan BUMDes yang efektif dan efisien sangat penting untuk mencapai tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

6. Dampak terhadap Keberlangsungan Tata Kelola

Tata kelola yang baik sangat penting untuk keberlanjutan BUMDes karena berpengaruh pada efektivitas, efisiensi, dan keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan desa. Dengan menerapkan prinsip-prinsip manajemen perusahaan yang baik, BUMDes dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan ekonomi desa.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Abadi, R. (2021). Pengembangan BUMDes melalui Pendekatan Berkelanjutan. *Jurnal Ekonomi Desa*, 11(2), 45-59.
- [2] Afifah, A. & Supriyanto, H. (2022). Strategi Kolaborasi BUMDes dengan Sektor Swasta. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi*, 10(3), 134-145.
- [3] Aidi, Syahrul (2020), BUMDes belum signifikan mengentaskan kemiskinan di Riau, www.Gatra.com, <https://www.gatra.com/news-465128-ekonomi-bumdes-di-riau-belum-optimal-mengentas-kemiskinan.html>.
- [4] Bastian, N. (2021). Strategi Peningkatan Pendapatan BUMDes melalui Diversifikasi Usaha. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 6(4), 53-67.
- [5] Dany (2023), Cara Merencanakan dan Mengelola Keuangan BUMDes, <https://id.video.search.yahoo.com/>

-
- [6] Fira, P. (2020). Penerapan Keuangan Berkelanjutan dalam Manajemen BUMDes. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen*, 11(1), 78-89.
- [7] Harsojo, B. (2021). Strategi Pengelolaan Keuangan yang Efisien pada BUMDes. *Jurnal Keuangan dan Ekonomi*, 10(2), 54-65.
- [8] Huda, F., & Wijaya, B. (2021). Manajemen Risiko dan Pemasaran pada BUMDes. *Jurnal Manajemen Keuangan*, 13(2), 39-53.
- [9] Iwan, D., & Yulia, S. (2023). Manajemen Keuangan yang Transparan dalam Pengelolaan BUMDes. *Jurnal Akuntansi Pembangunan*, 10(4), 90-102.
- [11] Maulana, Agus., (2024) Analisis Kinerja Direktur BUMDes di Kabupaten Indragiri Hilir, Disertasi, UNRI, Pekanbaru
- [12] Maulana, Agus, (2021), Kinerja SDM BUMDes, PRCI.
https://www.academia.edu/86126739/KINERJA_SUMBER_DAYA_MANUSIA BUMDES.
- [13] Maulana, Agus, (2021) Strategi Pengembangan SDM BUMDes Unggul,
https://www.academia.edu/56802152/STRATEGI_PENGEMBANGAN_SDM BUMDES_UNG GUL?uc-g-sw=38424664
- [14] Ramayani, FR & Fitri, YE, (2023), Analisis Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Desa (Studi Kasus di Desa Muara Sungai, Kecamatan Cambai, Kota Prabumulih, *Jurnal Bisnis Manajemen dan Ekonomi* 4(4):400-410, DOI:10.47747/jbme.v4i4.1414.
- [15] UU No. 22 Tahun 1999, tentang Otonomi Daerah
- [16] UU No. 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah membentuk BUMDes
- [17] UU No. 6 Tahun 2014, tentang diperkuat dengan PP No. 43 Tahun 2015 dan PP No. 11 tahun 2021 tentang Perkuatan Pendirian BUMDes sebagai Lembaga Ekonomi Desa
- [18] Zulkarnain., et. al (2025), Zulkarnain, Abd Rasyid S., Jahrizal., Agus Maulana, Strategi Pengembangan Bisnis BUMDes, *Graha Ilmu.*, 1 (1), 41-42.